

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema mengenai Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat di Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di pemerintah Desa yang mengatur dan membina masyarakat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus permasalahan di desa sitanggor adalah bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa sitanggor kecamatan muara kabupaten tapanuli utara.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Otonomi merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat jsesuai peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan konsep otonomi daerah maka akan lebih terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan karena masyarakat bisa langsung menyuarakan pada pemerintahan daerah tanpa perlu datang ke pemerintahan pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pengertian ini dapat dilihat seorang kepala desa memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur pemerintahannya di balik kebebasan tersebut terkandung resiko yang besar pula, dimana kepala desa harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa.

Ruang lingkup terkecil pembangunan dimulai dari tingkat desa. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Pelaksanaan pembangunan desa diharapkan akan menciptakan landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang diatas kemampuan sendiri. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan adanya pemerataan pembangunan nasional yang kemudian hasil-hasil dari pembangunan tersebut akan dipergunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 dijelaskan bahwa: pembangunan desa dan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan pembangunan sektoral. Kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pertumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa

swadaya dan swakarsa menjadi desa swasembada.”di dalam kegiatan pembangunan desa tidak akan dapat terlaksana apabila dilakukan hanya oleh pemerintah semata, harus ada partisipasi dari masyarakat yang menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan merupakan bentuk dari usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan desa hendaknya didukung oleh semua lapisan masyarakat sebab pembangunan tersebut tidak hanya membutuhkan dana, tenaga, dan teknologi akan tetapi juga membutuhkan kesadaran, pengertian dan dukungan yang kuat dari masyarakat itu sendiri. Dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa pada tempat tertentu, maka diperlukan sosok pemimpin di suatu desa yang pada umumnya disebut sebagai kepala desa.

Kepala desa dalam keabsahannya mempunyai legalitas yang kuat ditengah-tengah masyarakat secara langsung. Proses pemilihan dan pergantian kepala desa sangatlah demokratis dan sangat terbuka sehingga wajar saja jika dalam suatu desa yang terpilih menjadi kepala desa adalah tokoh masyarakat setempat. Salah satu fungsi kepala desa adalah sebagai mediator sekaligus administrator atas kepentingan pemerintah maupun masyarakat di dalam pembangunan, sehingga apa yang menjadi program pemerintah dapat didukung oleh masyarakat dan begitu juga sebaliknya apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat ditanggapi oleh pemerintah.

Desa Sitanggor adalah desa yang terletak di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan dari pengamatan yang di lakukan penulis ,Adapun

permasalahan-permasalahan yang pertama yaitu: Terdapat pada Kepala Desa Sitanggor dimana Kepala Desa Sitanggor masih kurang memberi komunikasi, motivasi dalam memberi arahan dan masih kurang mengerakan masyarakat untuk ikutsertaan bersama-sama melakukan perbaikan dan kebersihan terhadap desanya seperti bergotong royong dalam pembangunan.

Kemudian yang kedua permasalahan pada masyarakat dimana partisipasi masyarakat masih rendah dan belum ada kemajuan. masyarakat hanya memikirkan diri sendiri dan menyerahkan semua tanggung jawab kepada kepala desa sehingga kepala desa sitanggor kesulitan dalam memberi arahan-arahan kepada masyarakat. sebagian masyarakat desa sitanggor juga memiliki partisipasi dan organisasi yang sangat rendah dan tidak ingin maju sama sekali .masyarakat di Desa Sitanggor pada saat dilakukan pertemuan/rapat yang dilakukan pemerintah desa, masyarakat sebagian tidak mau tau dan tidak mau menyampaikan aspirasi nya.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir di perguruan tinggi dengan judul: PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SITANGGOR KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Dalam Pembangunan desa Sitanggor Kecamatan Muara kabupaten Tapanuli Utara

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan kepala Desa Sitanggor kecamatan muara dalam memimpin desanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Sitanggor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tentang peranan kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

a. Secara Teoritis

Bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian sebagai bahan informasi dan dapat memberi masukan yang berguna bagi kepemimpinan Kepala Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dan perlu diadakan dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial. Menurut Thoha yang dikutip dari Dani Akbar “Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.” Orang yang menjalankan kepemimpinan selanjutnya disebut pemimpin. Pemimpin memegang peranan penting dalam suksesnya pencapaian tujuan suatu kelompok/organisasi. Menurut Rivai yang dikutip dari Asep Hermansyah dan Rostiena Pasciana mengatakan bahwa kepemimpinan suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam organisasi, kepemimpinan

pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandang organisasi secara menyeluruh, mengambil keputusan, melaksanakan keputusan dan melimpahkan wewenang dan menunjukkan kesetiaan. Sedangkan, Terry menyatakan bahwa pemimpin memikul tanggung jawab dan berusaha untuk menangani masalah yang dihadapi organisasi. Oleh beberapa ahli, pemimpin dipandang sebagai inti dari manajemen dan perilaku kepemimpinan merupakan inti perilaku manajemen. Inti kepemimpinan adalah pembuatan keputusan, termasuk keputusan untuk tidak memutuskan. Kepemimpinan dan

manajemen akan berjalan jika ada keputusan yang dijalankan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Menurut Chapman dalam Muslim bahwa variabel-variabel kepemimpinan ialah sebagai berikut:

a. Cara berkomunikasi

Setiap pemimpin harus mampu memberikan informasi yang jelas, oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan lancar. Kemampuan berkomunikasi bagi seorang pemimpin benar-benar memegang peranan penting guna memperlancar dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang berkaitan dengan operasional.

b. Pemberian motivasi

Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan-dorongan atau memberikan motivasi kepada bawahannya, baik motivasi secara finansial maupun non finansial. Hal ini dapat menciptakan prestasi dan suasana kondusif bagi keberhasilan suatu organisasi.

c. Pengambilan keputusan

Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta, serta keputusan yang diambil tersebut mampu memberikan motivasi bagi bawahan untuk bekerja lebih baik bahkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan produktivitas kerja dengan demikian keputusan yang diambil tersebut berlaku efektif dalam menanamkan rasa percaya diri bawahan.

d. Kekuasaan yang positif

Seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi atau perusahaan walaupun dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tentu saja harus memberikan rasa aman bagi bawahan atau karyawan yang bekerja (positive leadership).

2.1.2 Fungsi kepemimpinan

Menurut (Zainal, Haddad, & Ramly, 2017:34) secara operasional dikelompokkan ke dalam lima fungsi pokok kepemimpinan yaitu:

1. Fungsi intruksi
Komunikasi satu arah, pemimpin sebagai komunikator merupakan penentu kebijakan agar keputusan dilakukan secara efektif dan mampu memotivasi orang lain untuk mengikuti perintah.
2. Fungsi konsultasi
Komunikasi dua arah, dimana penetapan keputusan pemimpin perlu mempertimbangkan kepada kepegawaiannya untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) sehingga keputusan yang diambil akan lebih mudah mendapatkan dukungan.
3. Fungsi partisipasi
Pemimpin harus berusaha mengaktifkan keikutsertaan pegawainya baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Partisipasi bukan berarti bertindak bebas tetapi lebih terarah dalam kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain
4. Fungsi delegasi
Memberikan limpahan wewenang atau menetapkan keputusan baik dalam konteks persetujuan ataupun tidak dari pimpinan. Sedangkan orang yang dipercaya menerima delegasi diyakini merupakan tangan pimpinan.
5. Fungsi pengendalian
Kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah untuk tercapainya tujuan bersama.

Fungsi kepemimpinan secara operasional dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Fungsi Instruktif Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, dimana pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi menginstruksikan pelaksanaannya dengan orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator adalah pihak yang menentukan isi perintah, kemudian bagaimana cara mengerjakan perintah, waktu memulai, melaksanakan, dan

melaporkan capaiannya serta dimana tempat dalam melaksanakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif.

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini berlangsung dan memiliki sifat komunikasi dua arah, meskipun pada pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Pada tahap pertama dalam menetapkan keputusan pemimpin seringkali memerlukan pertimbangan yang mengharuskannya berkomunikasi dengan beberapa orang yang dipimpinnya. Konsultasi ini dapat dilakukan secara terbatas, hanya dengan orang-orang tertentu saja yang dinilai memiliki berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan sebuah keputusan.

3. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini tidak hanya sekedar berlangsung apalagi bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin. Dalam menjalankan fungsi ini seorang pemimpin berusaha menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya baik pada keikutsertaan mengambil keputusan maupun pada proses pelaksanaannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk turut berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan yang telah dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing.

3. Fungsi Delegasi

Fungsi yang dilaksanakan dengan memberikan wewenang atau menetapkan keputusan ini baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari seorang pemimpin. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi apa yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan pada orang-orang yang dipercayai. Pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang yang sesuai dengan jabatannya dan apabila diberi/mendapat pelimpahan wewenang.

4. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak mustahil untuk dilakukan komunikasi dua arah. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu untuk mengatur aktifitas anggotanya secara terarah

dengan koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan akan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini diwujudkan melalui bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Selanjutnya terkait dengan fungsi pemimpin, pemimpin juga memiliki peranan sebagai berikut:

- a. Membantu menciptakan iklim sosial yang baik.
- b. Membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri.
- b. Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja.
- c. Mengambil tanggung jawab untuk menetapkan keputusan bersama dengan kelompok.
- d. Memberi kesempatan pada kelompok untuk belajar dari pengalaman.

Menurut Kartono indikator-indikator dalam kepemimpinan kepala desa yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial, apabila orang telah mengadakan hubungan komunikasi, maka apakah komunikasi yang mereka lakukan adalah sistem tersebut dapat memepererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan, atau memepererat hubungan.

2. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah keadaan menanggung segala sesuatu, kewajiban, memikul tanggungjawab, menanggung segala sesuatu dan juga menanggung akibatnya.

3. Keaktifan Pemimpin

Keaktifan yang dimaksud adalah bagaimana keaktifan seorang pemimpin dalam memberi pemahaman kepada bawahannya.

4. Motivasi

Motivasi yang dimaksud adalah motivasi sebagai dorongan yang menyebabkan masyarakat berusaha mencapai tujuan, baik sadar atau tidak sadar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang lain untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan tidak hanya berarti pemimpin terhadap manusia, tetapi juga pemimpin terhadap perubahan. Seorang pemimpin tidak hanya mempengaruhi bawahan, tetapi juga merupakan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bawahannya. Oleh sebab itu definisi dan penafsiran tentang kepemimpinan semakin beragam dalam perkembangannya.

2.1.3 Gaya dan Tipe Kepemimpinan

Pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen, watak, dan kepribadian tersendiri yang unik dan khas, hingga tingkah laku dan gaya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut Fiedler dalam [http://tunas muda.wordpress.com](http://tunas.muda.wordpress.com) mengelompokkan gaya kepemimpinan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada orang (hubungan). Dalam gaya ini pemimpin akan mendapatkan kepuasan apabila terjadi hubungan yang mapan diantara sesama anggota kelompok dalam suatu pekerjaan. Pemimpin menekankan hubungan pemimpin dengan bawahan atau anggota sebagai teman sekerja.
2. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Dalam gaya ini pemimpin akan merasa puas apabila mampu menyelesaikan tugas-tugas yang ada padanya. Sehingga tidak memperhatikan hubungan yang harmonis dengan bawahan atau anggota, tetapi lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai prioritas yang utama.

3. Teori Jalan Kecil-Tujuan (path-Goal Theory) menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahan atau anggotanya.

Berdasarkan hal tersebut, House dalam M. Thoha, (1996:259) gaya utama kepemimpinan adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan direktif. Gaya ini menganggap bawahan tahu senyatanya apa yang diharapkan dari pimpinan dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pimpinan. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahan atau anggota. Gaya ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian yang murni terhadap bawahan atau anggotanya.
- b. Kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari para bawahannya namun pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Dessler (2002:27) mengatakan bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota tim. Adapun definisi kepemimpinan partisipatif menurut Yuki (dalam Husain 2011:12) terdapat empat poin penting yaitu:

1. Mengembangkan dan mempertahankan hubungan
2. Memperoleh dan memberi informasi
3. Membuat keputusan
4. Mempengaruhi orang.

Gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada tingginya dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tetapi sedikit pengarahan. Gaya pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai “partisipatif” karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan gaya partisipatif ini, pemimpin dan bawahan saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.

Dalam aktivitas menjalankan organisasi, pemimpin yang menerapkan gaya ini cenderung berorientasi kepada bawahan dengan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibandingkan mengawasi mereka dengan ketat. Mereka mendorong para anggota untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok.

Selain itu gaya ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran bawahan terhadap persoalan-persoalan dan mempengaruhi bawahan untuk melihat perspektif baru. Melalui gaya ini, pemimpin terus merangsang kreativitas bawahan dan mendorong untuk menemukan pendekatan-pendekatan baru terhadap masalah-masalah lama. Bawahan didorong untuk berpikir mengenai relevansi cara, sistem nilai, kepercayaan, harapan, dan bentuk organisasi yang ada. Bawahan didorong untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan persoalan dan berkreasi untuk mengembangkan kemampuan diri, didorong untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang menantang. Dengan kata lain, bawahan diberi kesempatan untuk mengekspresikan dan mengembangkan dirinya melalui tugas-tugas yang dihadapinya.

Pemimpin gaya partisipatif menunjukkan perilaku dan perhatian terhadap anak buah yang sifatnya individual (*individual consideration*). Artinya dia bisa memahami dan peka terhadap masalah dan kebutuhan tiap-tiap anak buahnya. Hal ini tercermin dari persepsi anak buah yang merasa bahwa sang pemimpin mampu memahami dirinya sebagai individu. Setiap anak buah merasa dekat dengan

pemimpinnya dan merasa mendapat perhatian khusus. Perhatian individual dapat berupa aktivitas pembimbingan dan mentoring, yang merupakan proses pemberian feedback yang berkelanjutan dan pengkaitan misi organisasi dengan kebutuhan individual sang anak buah. Dengan demikian anak buah akan merasakan pentingnya berusaha dan bekerja semaksimal mungkin atau menunjukkan kinerja yang tinggi karena itu terkait langsung dengan kebutuhannya sendiri. Bawahan lebih merasa memiliki respek terhadap atasan yang kompeten dibandingkan atasan yang lebih mengedepankan aspek struktur.

Gaya kepemimpinan partisipatif menyangkut usaha-usaha seorang pemimpin untuk mendorong dan memudahkan partisipasi oleh orang lain dalam membuat keputusan-keputusan yang tidak dibuat oleh pemimpin itu sendiri. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan (Ranupandojo, 2000:75). Adapun aspek-aspek dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis.

Indikator langsung dari adanya kepemimpinan partisipatif ini terletak pada perilaku para pengikutnya yang didasarkan pada persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang digunakan (Thoha,2004:46). Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan (Bass, dalam Zhang, 2005;25). Kepemimpinan partisipatif

berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur putusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin.

- c. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahannya untuk berprestasi. Demikian juga pemimpin memberikan keyakinan kepada mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik
- d. Kepemimpinan situasional yaitu menjelaskan tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam hal pencapaian tujuan.

Menurut Nawawi (2004:83) bahwa apabila aktivitas kepemimpinan dipilih-pilih, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan ini gilirannya ternyata merupakan dasar dalam membedakan atau mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu:

- a. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas.
- b. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama.
- c. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai.

Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut akan terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari tiga pokok kepemimpinan, yaitu:

1. Tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter, mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya terlebih dahulu. Pemimpin bergaya dan bertipe otoriter selalu berdiri jauh dari anggota kelompoknya, ia akan senantiasa memiliki kekuasaan absolute atau

tunggal, pada kondisi dan situasi dan sikap dan pribadinya yang kaku. Penonjolan diri yang berlebihan sebagai simbol keberadaan organisasi . hingga cenderung bersikap bahwa dirinya dan organisasi adalah identik. Dalam menentukan dan menerapkan disiplin organisasi begitu keras dan menjalankannya dengan sikap kaku. Pemimpin bergaya dan bertipe ini juga tidak dapat dikritik. Bawahannya juga tidak akan mendapat kesempatan untuk memberikan saran maupun pendapat. Apabila pemimpin ini sudah mengambil keputusan, biasanya keputusan itu berbentuk perintah dan bawahannya hanya melaksanakan saja.

2. Tipe kepemimpinan kendali bebas Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat.
3. Gaya dan tipe kepemimpinan demokratis Gaya ini adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efektif kepada para bawahannya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahannya, dengan penekanan rasa tanggungjawab dan kerja sama yang baik. Ia rela dan mampu melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahannya sedemikian rupa kehilangan kendali organisasionalnya dan tetap bertanggungjawab atas tindakan para

bawahannya berbuat kesalahan dan tidak serta merta bersifat menghukum atau mengambil tindakan yang punitive, Rivai(2004:56).

2.1.4 Fungsi Kepemimpin

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Nawawi (1995:74), fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi yaitu:

1. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktifitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinya.
2. Dimensi yang berkenan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin.

Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Nawawi secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok

sebagai komunikator yang kepemimpinan, yaitu:

- a. Fungsi Instruktif Fungsi instruktif, pemimpin berfungsi menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu

memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

- b. Fungsi Konsultasi Pemimpin dapat menggunakan fungsi ini sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
- c. Fungsi Partisipasi Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai posisi masing-masing.
- d. Fungsi Delegasi Pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan.
- e. Fungsi Pengendalian Kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal

Fungsi kepemimpinan menurut pendapat Hadari Nawawi di atas, dapat menggambarkan apa yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan organisasinya, yang tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut Yuki (1998:33) dalam bukunya yang berjudul kepemimpinan dan organisasi, menyatakan fungsi kepemimpinan hakiki yakni sebagai berikut:

- a. Sebagai penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha untuk pencapaian tujuan.
- b. Sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak luar.
- c. Sebagai komunikator yang efektif.
- d. Sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral.

Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuannya serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para manajernya (pimpinannya). Apabila manajer mampu melaksanakan fungsifungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan dapat mencapai sasarnya. Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Rivai (2012: 53) dalam buku Kepemimpinan dan Organisasi menyatakan fungsi pokok kepemimpinan yaitu:

Fungsi intruksi bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan, apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

Fungsi konsultasi bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang

dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan, konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

Dalam menjalankan fungsi partisipatif pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya partisipasi bukan berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara kendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang atau membuat keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

Fungsi pengendalian berarti kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan

Menurut Pariatra Westra (Widi Astuti, 2008:14) fungsi partisipasi menjadikan anggota kelompok lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Burt K. Schalan dan Roger (Widi Astuti, 2008:14) fungsi partisipasi lebih banyak bawahan mempengaruhi keputusan. Potensi untuk memberikan sumbangan yang berarti dan positif, diakui dalam derajat lebih tinggi

Dalam hal lain juga, fungsi partisipasi dimana pimpinan memberikan kepercayaan sepenuhnya dengan bawahan dalam bentuk memberikan contoh kinerja langsung, pimpinan memberikan suritauladan dalam bentuk kinerja yang baik dan memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi anggotanya. Pimpinan selalu bersikap tegas dalam mengarahkan pekerjaan dengan bawahan serta pimpinan langsung melihat kinerja bawahannya yang lebih baik dalam bekerja. Pimpinan mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif.

2.1.5 Tugas Kepala Desa

Dalam Keputusan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab V Pasal 26 bahwa kepala desa memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
2. Melaksanakan Pembangunan Desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

2.1.6 Wewenang Kepala Desa

Dalam Keputusan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab V Pasal 26 bahwa kepala desa memiliki kewenangan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan di desa sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa,
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,
4. Menetapkan Peraturan Desa,
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
6. Membina kehidupan masyarakat Desa,
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa,
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa,
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa,
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna,
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif,
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7 Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam Keputusan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab V Pasal 26 bahwa kepala desa memiliki hak dan kewajiban di dalam melaksanakan tugas pemerintahan di desa.

Hak kepala desa sebagai berikut:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa,
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa,;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan,
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kewajiban kepala desa sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa,
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa,
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik,

- 9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa,
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa,
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa,
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa,
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa,
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa,
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian rakyat desanya. Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai pananggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan.

2.2 Pengertian Desa

Menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya diartikan sebagai komunitas. Dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik menurut corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, desa sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat istiadat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan

sangat rendah. Sedangkan dilihat dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara, Juliantara (2004:8)

Kepala Desa Menurut pendapat Bayu Suriningrat (2001:64) Kepala Desa adalah penguasa tunggal didalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.

Dalam undang-undang No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dari atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atau prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten atau kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan

sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda.

Pemerintah desa terdiri dari atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang didalam tata cara prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 maka dikatakan pasal 26 sebagai berikut :

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mengetahui tugas dan wewenang kepala desa dan berbagai perangkat desa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kepemimpinan kepala desa pada dasarnya adalah bagaimana kepala desa dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa dalam proses membangun desanya harus menyadari bahwa hal tersebut bukanlah tanggungjawab kepala desa saja melainkan terhadap elemen lain yang harus diberdayakan baik para aparat desa maupun pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kepala desa harus mampu melimpahkan wewenang kepada semua tingkat pimpinan sesuai dengan struktur dan lembaga yang ada.

Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Demikian pula dengan masyarakat yang dipimpin, selaku bawahan juga harus mengetahui apa yang harus dikerjakan atas dasar kesadarannya bukan keterpaksaan dengan tanpa ragu-ragu dan melakukannya dengan baik, sekalipun kepala desa tidak berada di tempat, misalnya dalam hal tolong menolong dan gotong royong sehingga menimbulkan sifat kemandirian di tengah - tengah masyarakat

Untuk itu berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penekanan dan perhatian khusus penulisan skripsi ini akan di tujukan pada kemampuan kepala desa yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang megutamakan pelayanan dan kepentingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yakni menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan kehidupan masyarakat dan kemampuan kepala desa selaku pimpinan desa dalam mengayomi warganya.

Untuk itu berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penekanan dan perhatian khusus penulisan skripsi ini akan di tujukan pada kemampuan kepala desa yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang megutamakan pelayanan dan kepentingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yakni menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan kehidupan masyarakat dan kemampuan kepala desa selaku pimpinan desa dalam mengayomi warganya.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan

sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggungjawab menentukannya. Ada dua persepsi partisipasi di Indonesia yang berbeda antara persepsi yang diartikan masyarakat dengan yang dipersepsikan pemerintah. Di Indonesia kata ini begitu sering digunakan siapa pun sebagai strategi pembangunan dalam hampir setiap kesempatan, sehingga makna sebenarnya mulai terasa kabur. Para aparat pemerintah mengartikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas bukan dari rakyat sendiri. Zulkarnain Nasution mengatakan Definisi tersebut diartikan dengan istilah mobilisasi, sedangkan pengertian partisipasi menurut perspektif masyarakat mengandung suatu pengakuan, kreativitas dan inisiatif dari rakyat modal dasar proses pelaksanaan pembangunan, dengan demikian masyarakat menciptakan pembangunan bukan melalui pendukung pembangunan.

Sutrisno Loekman mengatakan ada dua pengertian partisipasi yakni: pertama, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencanaan; kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Menurut Uphoff dkk, (2017:26) mengemukakan pengertian partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hidup mereka. Partisipasi dalam pembangunan desa merupakan satu prasyarat untuk keberhasilan proses

pembangunan di pedesaan, namun adanya hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan dalam usaha melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif karena pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (dalam hal ini pemerintah) belum memahami makna sebenarnya dari konsep partisipasi.

Defenisi partisipasi yang berlaku di lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan tujuannya ditentukan oleh pemerintah. Proyek-proyek pembangunan pedesaan yang berasal dari pemerintah diistilakan sebagai proyek pembangunan pedesaan yang diutuhkan masyarakat, sedangkan proyek pembangunan yang diusulkan masyarakat dianggap sebagai keinginan, karena itu proyek ini menjadi prioritas yang rendah dari pemerintah. Defenisi inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi.

Oleh karena itu para perencana dan pelaksana pembangunan dalam hal ini pemerintah harus memahami secara benar-benar konsep untuk melahirkan partisipasi masyarakat dari bawah. Agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat suatu partisipasi perlu dilakukan. Pendekatan pembangunan partisipasi harus dimulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan penilaian, disamping bantuan pembangunan.

Menurut Uphoff (2017:27) ada tiga dimensi partisipasi antara lain :

1. jenis partisipasi apa yang dipertimbangkan,
2. siapa yang berpartisipasi didalamnya dan
3. bagaimana partisipasi terjadi.

Untuk jenis partisipasi ada empat yaitu (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam memanfaatkan hasil, (4) partisipasi dalam penilaian.

Keempatnya telah mencakup rangkai berbagai aktivitas pengembangan pedesaan yang terintegrasi secara potensial.

Partisipasi dalam pembangunan akan berguna untuk mengetahui : (a) apakah inisiatif untuk berpartisipasi sebahagian besar dari pemerintah atau masyarakat lokal, atau (b) apakah relevan untuk menganalisa dan membandingkan dari waktu ke waktu (c) struktur dan (d) jalur-jalur partisipasi, misalnya apakah partisipasi terjadi berdasarkan individu atau kolekti, dengan organisasi formal atau informal, atau apakah partisipasi terjadi secara langsung atau melibatkan representasi tidak langsung dan selanjutnya pertimbangan yang harus dilakukan antara lain (e) durasi dan (f) ruang lingkup partisipasi, apakah berlangsung sekali atau untuk selamanya (once and for all) dan (g) pemberdayaan, yakni seberapa efektif keterlibatan seorang dalam pengambilan keputusan membawanya menuju ke arah hasil-hasil yang diinginkan.

Pendekatan partisipasi pengembangan pedesaan memerlukan suatu kombinasi antara (1) desentralisasi administrative, yang membawa berbagai institusi dan aparat pemerintah lebih dekat kearah sektor pedesaan dan

mengorientasikannya kembali kepada kebutuhan masyarakat (2) pembangunan atau kerja melalui organisasi atau lembaga lokal yang ada dimana organisasi ini dapat berperan atas nama masyarakat desa (3) menempatkan para pemimpin lokal dalam suatu posisi sentral guna menjembatani antar masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini para pemimpin lokal tersebut benar-benar mewakili kepentingan semua masyarakat.

Dari pendekatan partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa sistem institusi dan sistem peran semacam ini dalam sektor pedesaan menciptakan keterkaitan yang lebih seimbang dan saling bergantung antara pemerintah dan masyarakat desa, dalam sistem ini tidak berdasarkan structural top down yang sama dengan pendekatan sebelumnya.

Kemudian menurut Uphoff ada empat prinsip umum partisipasi pengembangan pedesaan antara lain:

- a. Partisipasi tidak boleh dipandang sebagai sebuah program atau sektor yang terpisah bagi pengembangan pedesaan, namun malah sebagai sebuah pendekatan yang mungkin harus disatukan dalam semua aktivitas.
- b. Partisipasi pengembangan pedesaan harus menekankan pada organisasi lokal, yang lebih dapat mendengarkan masukan dari masyarakat desa serta memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat desa yang lebih banyak dalam berbagai program pengembangan pedesaan.
- c. Pembagian aset harus diperhatikan dalam membangkitkan partisipasi, karena semakin tidak merata pembagian maka akan semakin sulit untuk membangkitkan partisipasi secara luas baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam keuntungan.
- d. Penekanan yang harus dilakukan untuk membangkitkan partisipasi pengembangan pedesaan bukan pada otonomi lokal saja, tetapi hubungan pusat regional dengan masyarakat lokal dengan syarat-syarat yang disetujui oleh semua pihak saling menguntungkan.

Dari keempat prinsip tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat desa jangan dipandang sebagai sebuah program yang terpisah dari pengembangan

pedesaan, menekankan pada organisasi lokal, pembagian aset harus merata dan hubungan pusat regional dengan masyarakat lokal harus disetujui semua pihak dan saling menguntungkan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desaan pelaksanaan pembangunan ada tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan.

2.3.1 Bentuk partisipasi

Partipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi (dalam Irene 2011:58) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal, disebut partisipasi vertikal karena terjadi bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal adalah masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya, partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi (dalam Dwiningrum, 2015:59) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Partisipasi secara fisik, dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan lainnya.
2. Partisipasi secara non fisik, merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui

pendidikan, sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahnya kepada masyarakat yang bersekolah.

Menurut Huraerah (2011:116) menyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau keterampilan, dalam bentuk sosial. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, partisipasi dalam bentuk barang dan partisipasi dalam bentuk uang.

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Dalam suatu kegiatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun dapat menghambat keberhasilan suatu program.

Menurut Angel (2011:184) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral dan nilai

masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungan nya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

2.4 Pembangunan Desa

Menurut Listyaningsi (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik. Menurut Tjokroamidjojo (dalam Listyaningsi 2014:44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu dan bangsa menuju modernitas, pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka pencapaian tujuan negara yang bersangkutan.

Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut H.A. Tabrani Rusyan (2018:50) Mengatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 13 setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Menurut Rahayu (2017:178) “desa adalah berasal dari bahasa sansekerta desi yang berarti tanah kelahiran. Istilah ini telah ada sejak tahun 1114 ketika nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan”. Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan.

Menurut Koentjaningrat (dalam Santoso, 2017:93) “desa adalah komunitas kecil yang menetap di suatu tempat. Dalam hal ini beliau tidak memberikan

penegasan spesifik, bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian”.

Secara administratif indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 014 tentang desa, khususnya pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Inonesia.

Menurut Bintoro (Rahayu 2017:179) ” desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain”.

Menurut simangunsong (2014:182), menyatakan bahwa :

Desa adalah desa yang sesungguhnya yang harus dikembalikan lagi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan cara menghidupkan kembali jabatan- jabatan fungsional perangkat desa dalam membantu kepala desa, dimana jabatan fungsional tersebut sebenarnya sudah sejak dulu dan sangat eksis dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

2.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Pengertian sederhana tentang partisipasi dalam hubungannya dengan pembangunan adalah mengambil bagian atau ikut berperan secara aktif dalam semua proses pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan. Mubyarto (1988:52) mendefinisikan “Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap

program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.” Partisipasi masyarakat secara sukarela dalam proses pembangunan sangat diharapkan untuk membantu terwujudnya program pembangunan yang ada di perdesaan tanpa ada yang dikorbankan. Karena dengan demikian masyarakat memiliki rasa peduli atas pembangunan yang dilaksanakan. Soemodiningrat (1996:97) mengemukakan bahwa “Partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program atau proyek pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.” Dalam proses pembangunan diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat dan mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh dalam diri sendiri sehingga pembangunan yang telah dilakukan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai “Keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.” Beliau juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi).
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan).
- c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran dan efektivitas)

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi.

Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Dengan demikian pembangunan perdesaan merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Tentunya hal ini perlu dipahami bersama, bahwa wilayah dan komunitas di pedesaan ternyata belum diletakkan pada prioritas yang tinggi dalam kebijaksanaan pembangunan dibanding pembangunan di wilayah perkotaan. Sesungguhnya pembangunan perdesaan bukan upaya yang baru di Indonesia. Bahkan hal ini telah dicanangkan dalam berbagai kebijaksanaan

pembangunan nasional sejak awal kemerdekaan dengan sasaran yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Suatu hal yang telah menyadarkan kita bahwa persoalan penting yang dihadapi ialah belum tepatnya strategi pembangunan pedesaan. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa jalan pemikiran yang dianggap relevan dengan berbagai kondisi yang dihadapi saat ini ialah melaksanakan strategi perkembangan berkelanjutan. Dalam hal ini, wilayah dan komunitas pedesaan menempati prioritas yang tinggi dalam kebijaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Salah satu wujud pembangunan pedesaan adalah pembangunan fisik satu diantaranya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan usaha tani yang merupakan salah satu program dari pemerintah sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Partisipasi masyarakat secara sukarela dalam proses pembangunan sangat di harapkan untuk membantu terwujudnya program pembangunan yang ada di pedesaan tanpa ada yang di korbakan

Pembangunan pedesaan yang memberi fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan, jika diorientasikan untuk mewujudkan keberlanjutan proses dan manfaatnya dimasa depan, maka strategi yang penting dilaksanakan ialah menumbuhkan pembangunan yang berdasarkan kepercayaan diri (*self-reliant development*) (Tjokrowinoto, 1996). Strategi ini sebenarnya sudah tercermin dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui program IDT (*Inpres Desa Tertinggal*) sebagaimana dikemukakan Budi Soeradji dan Mubyarto (1998), upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui proses penguatan

penduduk miskin yang mencakup lima aspek yaitu pengembangan sumber daya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, mengembangkan kelembagaan penduduk miskin dan penciptaan sistem pelayanan kepada penduduk miskin yang sederhana dan efisien. Melalui jalur pendekatan tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu dengan kekuatannya sendiri menanggulangi kemiskinannya, serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan.

2.6 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul peneliti	Fokus penelitan	Hasil penelitian
1	Emilio (karya ilmiah skripsi 2018)	Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa panggak di kecamatan lingga di kabupaten lingga Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015	Berkonsentrasi pada kinerja Kepala desa yang masih kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian kepala desa kurang maksimal dalam mengambil suatu keputusan dikarenakan kurangnya ketegasan dari kepala desa dan penggunaan dana yang sering khmelenceng dengan apa yang awalnya direncanakan.	Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh emylio adalah peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Kepala desa di desa panggak masih kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian kepala desa kurang maksimal dalam mengambil suatu keputusan dikarenakan kurangnya ketegasan dari kepala desa dan

				penggunaan dana yang sering melenceng dengan apa yang awalnya direncanakan.
2	Nunung (skripsi 2019)	PeranKepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sampali,Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.	Berfokus ke kepala Desa Sampali dimana kepala Desa Sampali kurang masi mengarahkan dan menggerakkan ke masyarakat bersama-sama untuk melakukan perbaikan terhadap desanya seperti gotong royong dalam hal pembangunan drainase.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan desa berupa pengambilan keputusan, sebagai pusat informasi, pembinaan, dan keterlibatan masyarakat desa. Ada beberapa faktor penghambat yang menghambat Kepala Desa maupun Pemerintah Desa Sampali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, yaitu tingkat pendidikan masyarakatat rendah, usia, dan tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda-beda. Adapun Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini yaitu, Kepala Desa perlu lebih tegas dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, momotivasi

				masyarakat supaya tujuan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan baik
3	Sarifah (jurnal 2017)	peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peranan Pemerintah Desa	Berfokus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan atau partisipasi dari masyarakat. Selaku kepala desa atau pemimpin dalam penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang terjadi, mempunyai kemampuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan. 1. Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu : a. Berperan sebagai Dinamisator b. Berperan sebagai Katalisator c. Berperan sebagai Pelopor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan cukup baik. Namun, masih terdapat masalah yang belum bisa teratasi dengan maksimal, seperti Kepala Desa Telaga yang terlalu sering berpergian keluar kota untuk melakukan urusannya. Sehingga, jarang sekali berda di Desa selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya peranan dari seorang pemimpin di Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan. Pembangunan yang ada pun masih terbengkalai dan tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Masyarakat juga tidak dilibatkan semua dalam kegiatan rapat atau musrenbang.

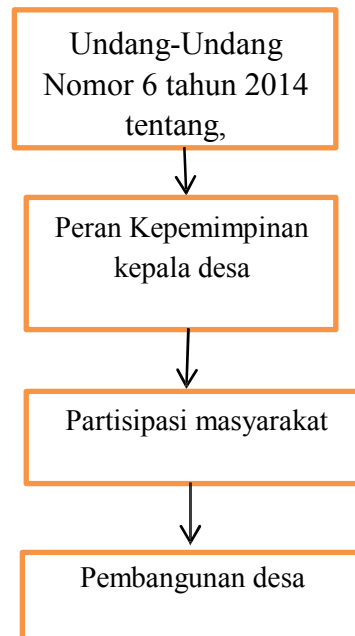
Penulis mengangkat judul “peranan kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara”. Yang menjadi fokus penelitian adalah Dalam penelitian kualitatif perlu dibuat batasan masalah yang berisi fokus atau pokok permasalahan yang di teliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan mempertajam pembahasan. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, sesuai dengan judul peneliti yaitu memiliki perbedaan mulai dari judul penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian. Namun, beberapa di antaranya terdapat persamaan yaitu metode penelitian kualitatif.

2.7 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaska secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep atau variabel tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai ; **peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Penelitian ini berangkat dari peraturan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kepala desa mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan masyarakat di desa tersebut sesuai keinginannya. Hubungan sebagai penguasa pemerintah desa, mengkoordinasi pembangunan desa dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Kepala desa berperan sebagai organisator pemerintah di desanya. Kepala desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup

pengelolaan pemerintah desa secara keseluruhan dimana kepala desa ikut Peran Kepemimpinan Kepala Desa Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa berperan di dalamnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daalam pembangunan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Moh Nazir (2017:37) mengatakan Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan suatu laporan dan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya dengan apa yang hendak diteliti. Adapun Penelitian ini dilakukan yaitu di Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Penentuan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian. Waktu penelitian dari bulan Januari - Agustus 2022.

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Suyanto dan Sutinah (2005:55) mengatakan data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi

terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subyek (informen) melalui proses wawancara.

b. Data Sekunder

Bagong Suyanto dan Sutinah (2005:56) mengatakan data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga.

3.4 Informan Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti di tempat penelitian diantaranya :

- a. Informan kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa sitanggor
- b. Informan utama, merupakan yang terlibat langsung dalam peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topik penelitian. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Aparat Desa sitanggor

- c. Informan Tambahan, merupakan pendukung biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Adapun informan Tambahan dalam penelitian adalah Masyarakat sitanggor.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis di dalam melakukan sebuah penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Menurut John W. Cresweel mengatakan pengumpulan data meliputi usaha membatasi Penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk mencatat informasi.

Data diperoleh melalui kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara wawancara/observasi kepada informan penelitian (data primer) dan data juga berasal dari bahan kepustakaan yang berupa buku, dari internet, serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data sekunder). Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk dapat digunakan.

Menurut Cresweel (2017:) langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Kualitatif, penelitian dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipasi, mewawancarai mereka, atau terlibat dalam fokus group (interview dalam kelompok tertentu). Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan beberapa pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka (open ended) yan dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipasasi masyarakat.
2. Dokumen-dokumen Kualitatif, selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen

publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).

3. Materi Audio dan Visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video atau segala jenis suara/bunyi.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informan dari para partisipasi, analisis bukti (data) terdiri atas dasar pengujian, pengkategorian, pentabulasian atau pun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk di analisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *generealsense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses pengolahan materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan berapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengambilan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragrafparagraf).

4. Menetapkan proses Coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategoikategori, dan tema-tema yang di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. mengajukan pertanyaan seperti “Pelajari apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkapkan suatu gagasan

Gambar 3.6 Teknik Analisis Data